

**SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG UMUM
DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMBA
BARAT DAYA**

Delsiana Kette¹, Cecilia D. P. B. Gabriel², Mitra Permata Ayu³

Universitas Stella Maris Sumba, Program Studi Teknik Informatika

E-mail: delsikette@gmail.com¹, cecylgabriel266@gmail.com², ayumitra94@gmail.com³

Abstrak

Pelayanan publik di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, khususnya pada bidang umum dan keuangan, masih menghadapi beberapa kendala, seperti proses administrasi yang belum terintegrasi, pencatatan data yang masih dilakukan secara manual, serta keterbatasan dalam penyajian informasi yang cepat dan akurat. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat maupun internal instansi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya guna mendukung pengelolaan data dan meningkatkan kualitas pelayanan. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode Waterfall, yang dilakukan secara bertahap dan sistematis mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistem. Sistem informasi yang dibangun berbasis web dan dilengkapi dengan fitur pengelolaan data administrasi pada bidang umum dan keuangan, penyimpanan data yang terstruktur, serta penyajian informasi secara cepat dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi ini mampu membantu mempercepat proses pelayanan, mengurangi kesalahan pencatatan data, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan pelayanan publik pada bidang umum dan keuangan dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan terorganisir dengan baik.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Pelayanan Publik, Bidang Umum Dan Keuangan, Waterfall.

Abstract

Public services at the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of Southwest Sumba Regency, particularly in the general and financial sectors, still face several challenges, such as non-integrated administrative processes, manual data recording, and limitations in providing fast and accurate information. These conditions can affect the effectiveness and efficiency of services for both the public and internal institutions. This study aims to design and develop a Public Service Information System for the General and Financial Sectors of the Secretariat of the DPRD of Southwest Sumba Regency to support data management and improve service quality. The system development method used in this research is the Waterfall method, which is carried out in a structured and sequential manner, including requirements analysis, system design, implementation, testing, and system maintenance. The developed information system is web-based and equipped with features for managing administrative data in the general and financial sectors, structured data storage, and fast and accurate information presentation. The results of this study indicate that the system can accelerate service processes, reduce data recording errors, and improve the effectiveness and efficiency of employee performance at the Secretariat of the DPRD of Southwest Sumba Regency. With the implementation of this

information system, it is expected that public services in the general and financial sectors will become more optimal, transparent, and well-organized.

Keywords: *Information System, Public Service, General and Financial Sector, Waterfall.*

PENDAHULUAN

Sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam mendukung fungsi legislatif melalui pelayanan administrasi dan keuangan yang efisien. Namun, sistem manual yang masih digunakan menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat, rawan kesalahan, dan sulit dalam pengawasan. Kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi menjadi sangat mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang umum dan keuangan. Namun, untuk menjalankan fungsi-fungsinya tersebut, DPRD memerlukan dukungan administrasi yang baik dan sistematis. Salah satu bagian penting dalam mendukung kelancaran administrasi DPRD adalah Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan berbagai layanan administrasi yang mendukung kegiatan DPRD, termasuk pengelolaan keuangan, administrasi umum, serta pengelolaan surat-menyurat dan perjalanan dinas anggota DPRD. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD sering menghadapi berbagai tantangan, di antaranya adalah adanya keterlambatan dalam pelayanan, rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta sulitnya akses terhadap data dan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang terlibat.

Pendapat publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja institusi pemerintahan, termasuk Sekretariat DPRD. Di era digital ini, masyarakat menuntut keterbukaan informasi dan pelayanan yang transparan. Kurangnya informasi publik yang mudah di akses dapat memunculkan spekulasi negatif, ketidakpercayaan, bahkan kritik terhadap lembaga Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, perlu di bangun sebuah sistem informasi pelayanan publik yang tidak hanya menyajikan data administrasi dan keuangan secara terbuka, tetapi juga memfasilitasi penyampaian dan pengelolaan pendapat masyarakat.

Pelayanan publik dan keterbukaan informasi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Prinsip keterbukaan harus menjadi salah satu landasan utama dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tugas pelayanan publik menjadi salah satu tugas pokok pemerintah. Tentang pedoman pengembangan budaya kerja aparatur negara, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39/KEP/M.PAN/4/2012 telah mengisyaratkan bahwa nilai budaya keterbukaan harus dapat mewarnai perilaku setiap aparatur negara dalam rangka peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan yang berorientasi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai visi dari reformasi birokrasi.

Berdasarkan observasi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pelayanan publik di bidang umum dan keuangan masih terbatas pada penggunaan komputer dasar dan belum terintegrasi, seperti pelayanan surat-menyurat, jadwal rapat masih dilakukan secara manual, komunikasi internal antarbagian dilakukan melalui WhatsApp dan komunikasi langsung, serta tidak ada sistem online yang dapat diakses publik untuk melihat informasi kegiatan dan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pelayanan informasi publik oleh Sekretariat DPRD masih memiliki beberapa kendala walaupun saat ini sudah menggunakan teknologi komputer, sebab komputer yang digunakan baru difungsikan untuk menyimpan data dan informasi yang dihasilkan belum dapat diakses langsung oleh masyarakat. Selain itu, penyampaian informasi mengenai kegiatan-kegiatan kedewanan maupun kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya website masih bersifat manual, dan cara untuk mempublikasikan informasi itu masih melalui pihak ketiga, karena Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya belum memiliki media yang tepat dan belum memiliki aplikasi yang dapat mengelola sistem informasi publik yang sifatnya online.

Berdasarkan peniliti diatas maka penulis menggunakan judul “Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lingkungan Implementasi

Lingkungan implementasi merupakan sebuah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam mendukung sebuah aplikasi yang di buat. Berikut adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan.

1) Perangkat Keras

Pembuatan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, penulis menggunakan perangkat keras berupa sebuah unit laptop dengan spesifikasi sebagai berikut

- a) Processor Intel AMD 64-bit
- b) Memori 4 GB DDR3
- c) HDD 500 GB
- d) DVD RW
- e) Keyboard dan Mouse

2) Perangkat Lunak

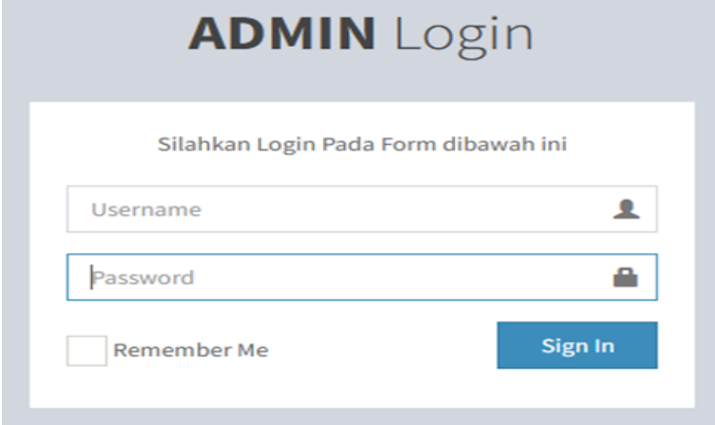
Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, penulis menggunakan perangkat lunak berupa sebuah unit laptop dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a) Microsoft Windows 10 Pro sebagai sistem operasi
- b) XAMPP Versi 3.2.2
- c) Google Chrome sebagai Browser
- d) Notepad ++

2. Hasil Implementasi Perangkat Lunak

a) Halaman Login

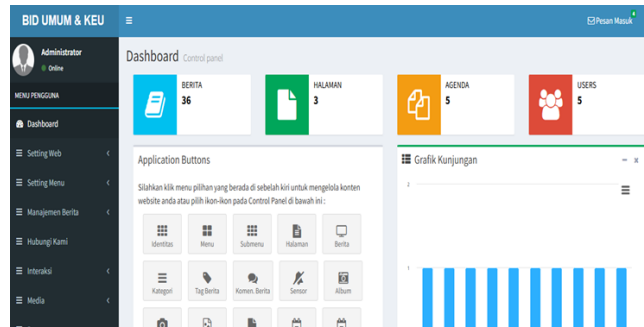
Halaman ini menampilkan halaman login untuk ke halaman administrator pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya



Gambar 18 Login

b) Halaman Utama

Dalam dashboard ini menampilkan halaman utama dari aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :



Gambar 19 Halaman Dashboard

c) Halaman Identitas Website

Halaman ini menampilkan identitas website pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya.

Gambar 20 Halaman Identitas Website

d) Halaman Form Tambah Halaman Baru

Halaman ini merupakan form tambah halaman baru pada web Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya. Form ini berisi judul, isi, gambar dan jika ingin menyimpan maka klik tambahkan dan jika membatalkan klik tombol batal sebagai berikut:

Gambar 21 Halaman Form Tambah Halaman Baru

e) Halaman Tampilan Halaman Baru

No	Judul	Link	Tgl Posting	Action
1	Struktur Organisasi	page/detail/struktur-organisasi	10 Mei 2017	[Edit] [Delete]
2	Visi dan Misi	page/detail/visi-dan-misi	06 Mei 2025	[Edit] [Delete]
3	Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya	page/detail/bidang-umum-dan-keuangan-sekretariat-dprd-kabupaten-sumba-barat-daya	25 Jan 2026	[Edit] [Delete]

Gambar 22 Halaman Tampilan Halaman Baru

f) Halaman Form Tambah Agenda

Halaman ini menampilkan form tambah agenda yaitu dengan mengisi tema, isi agenda, tempat, jam, tanggal, dan pengirim. Jika ingin menyimpan klik tombol tambahkan dan jika ingin membatalkan maka klik batal.

Gambar 23 Halaman Tambah Agenda

g) Halaman Semua Agenda

No	Tema	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Jam	Action
1	Penyusunan RKA dan DPA Sekretariat DPRD	09 Jan 2026	09 Jan 2026	09.00 s/d 13.00 WIB	[Edit] [Delete]
2	Verifikasi SPJ (Surat Pertanggungjawaban)	29 Des 2026	29 Des 2026	09.00 s/d Selesai	[Edit] [Delete]
3	Pembayaran Hak Keuangan DPRD	18 Nov 2025	25 Nov 2025	08.00 s/d 12.00 WIB	[Edit] [Delete]
4	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	10 Mar 2025	14 Mar 2025	09.00 s/d 13.00 WIB	[Edit] [Delete]
5	Persiapan agenda tahunan DPRD	22 Jan 2026	22 Jan 2026	10.00 s/d Selesai	[Edit] [Delete]

Gambar 24 Halaman Semua Agenda

h) Halaman Hubungi Kami

Gambar 25 Halaman Hubungi Kami

i) Tampilan Halaman Album Foto



Gambar 27. Halaman tambah jabatan

j. Tampilan Halaman Agenda

Penyusunan RKA dan DPA Sekretariat DPRD

Oleh : Administrator, Pada : 06 Jan 2026

Waktu	Aulla
Tempat	09 Jan 2026 s/d 09 Jan 2026, 09.00 s/d 13.00 WIB Wib
Pengirim	Delsi (085239803210)

Verifikasi SPJ (Surat Pertanggungjawaban)

Oleh : Administrator, Pada : 26 Okt 2025

Waktu	Bidang Sekretariat
Tempat	29 Des 2026 s/d 29 Des 2026, 09.00 s/d Selesai Wib
Pengirim	Acı (08189320984)

Pembayaran Hak Keuangan DPRD

Oleh : Administrator, Pada : 16 Nov 2025

Waktu	Biang Umum dan Keuangan
Tempat	18 Nov 2025 s/d 25 Nov 2025, 08.00 s/d 12.00 WIB Wib
Pengirim	Enda (08192839849)

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Oleh : Administrator, Pada : 04 Mar 2025

Misi	Bidang Umum dan Keuangan
------	--------------------------

Gambar 28 Tampilan Halaman Agenda

j) Tampilan Halaman Visi dan Misi

VISI DAN MISI
Visi : "Terwujudnya pelayanan administrasi, umum, dan keuangan Sekretariat DPRD yang profesional, transparan, akuntabel, dan mendukung kinerja DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya." Misi : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan umum dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD. 2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan rapat, sidang, dan kegiatan DPRD lainnya. 4. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD melalui tata kelola administrasi dan keuangan yang baik. 5. Mendukung keterbukaan informasi publik melalui pelayanan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses.

Gambar 29 Tampilan Halaman Visi Dan Misi

3. Hasil Pengujian

1) Teknik Pengujian

Pengujian perangkat lunak ini menggunakan metode pengujian black box. Pengujian box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak yang dibuat. Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya menggunakan data uji berupa pengolahan data, pengolahan proses dan pengolahan hasil serta informasi kelengkapannya.

Tabel 3. 6 Pengujian Data Berita, Data Agenda dan Data Pelayanan

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal)			
Data	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Penambahan data	Data masuk ke dalam database	Data masuk ke dalam database	diterima
Penyimpan data	Data baru disimpan ke dalam database	Data masuk ke dalam database	diterima
Perubahan data	Data dapat diubah hingga data lama dapat dirubah	Data masuk ke dalam database	diterima

	menjadi data yang baru		
Penghapusan data	Data dapat dihapus pada database	Data terhapus pada database	diterima
Kasus dan Hasil Uji (Data Normal)			
Yang diharapkan	Yang diharapkan	Yang diharapkan	Yang diharapkan
Nama Berita	Menampilkan pesan peringatan	pesan peringatan muncul	diterima
Nama Agenda	Menampilkan pesan peringatan	pesan peringatan muncul	diterima
Tanggal	Menampilkan pesan peringatan	pesan peringatan muncul	diterima

2) Kesimpulan Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian dengan kasus black box dapat ditarik kesimpulan bahwa perangkat lunak dapat mengetahui fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, kesalahan, inisialisasi, kesalahan terminasi dan secara fungsional mengeluarkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

- Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam memperoleh informasi data pelayanan DPRD dengan cepat dan tepat.
- Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dapat meminimalisir waktu dalam hal administrasi DPRD di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya

Saran

Penelitian ini telah membuat Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk penelitian selanjutnya saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya ini akan lebih efektif jika menggunakan aplikasi berbasis mobile atau android.
- Sistem informasi ini dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan sistem yang dapat diimplementasikan ke dalam perangkat lunak yang lebih user friendly..

DAFTAR PUSTAKA

- (2024). Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah... *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1308–1314. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3376>
- Alfons Umbu Awang, A. U. J., & Popo, A. T. (2024). Sistem Informasi Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya. *Polygon: Jurnal Ilmu Komputer dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 2(6), 08–15. <https://doi.org/10.62383/polygon.v2i6.252>
- Ashara Putri, I., Irawan, & Panggabean, F. Y. (2025). Public Service Information System Analysis on the Sibisa Application ... *International Journal of Society and Law*. <https://doi.org/10.61306/ijsl.v2i2.177>
- Dapadeda, A., & Emanuel, A. W. R. (2024). SIDARLIN: Evaluasi Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik pada Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur. *JST (Jurnal Sains dan*

- Teknologi), 12(3), 857–864. <https://doi.org/10.23887/jstundiksha.v12i3.73937>
- Dasni, D., Abidin, Z., & Ramadhan, S. (2025). Effectiveness of the Implementation of Local Government Information Systems in Financial Administration. *PERSPEKTIF*, 14(1), 19–29. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v14i1.12791>
- Hidayat, R., & Lestari, S. (2023). Evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 5(1), 45–60.
- Indira Septiani & Weti Isnawaty, N. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi...*, 7(4).
- Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemerintah Republik Indonesia.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.). Pearson.
- Maulidi, M. R., Safira, Z., Nabila, J., & Rahmati, R. (2025). Digital Transformation in Local Government: Enhancing Financial Transparency... *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.266>
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2021). *Introduction to Information Systems* (17th ed.). McGraw-Hill Education.
- Pranata, J., & Yamin, A. (2025). Strategi Inovasi Pelayanan Digital Administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat... *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(10), 11895–11899. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i10.9594>
- Pratama, E., & Yamin, A. (2025). Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam Implementasi Inovasi Digital Administrasi... *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(10), 11900–11905. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i10.9596>
- Putra, I. G. N., & Dewi, N. K. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Digital terhadap Kepuasan Pelayanan Publik di Kabupaten X. *Jurnal Pemerintahan Dan Sosial*, 12(1), 23–39.
- Rahayu, E., & Prasetyo, T. (2025). Strategi Peningkatan Akses Informasi Publik pada Pemerintahan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik Digital*, 3(1), 77–93.
- Roma, V., & Sutjisna, A. (2023). E-Government dan Transformasi Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 112–128.
- Sari, M. (2025). Integrasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan SIPD di Era Digital. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 11(3), 88–101.
- Stair, R., & Reynolds, G. (2022). *Principles of Information Systems* (14th ed.). Cengage Learning.
- Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. (2022). *Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance, Growth, and Sustainability* (12th ed.). Wiley.
- Yusuf, M. A., Haliah, H., Kusumawati, A., & Irwansyah, N. S. (2025). The Role of Digital Technology in Enhancing Public Service Efficiency in Indonesia. *Hasanuddin Economics and Business Review*. <https://doi.org/10.26487/hebr.v9i1.6420>